

Pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Manajemen Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah dalam Mewujudkan Efektivitas Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Keuangan Madrasah

Yeti Nuryeti

Program Studi Magister Pendidikan Islam, Universitas Garut

Abstrak. Tujuan penulisan artikel ini adalah membahas tentang pengaruh implementasi kebijakan terhadap manajemen Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) dalam mewujudkan efektivitas laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran keuangan sekolah di madrasah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan teknik survey, wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian ini adalah statistik dengan model analisis jalur (*path analysis*). Adapun populasi dan sekaligus menjadi responden dalam penelitian ini adalah Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta se-Kelompok Kerja Madrasah (KKM) MIN 02 Garut sebanyak 73 orang. Hasil pengujian hipotesis utama dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Manajemen RKAS dalam mewujudkan efektivitas laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran keuangan madrasah. Artikel ini berkesimpulan bahwa untuk mewujudkan efektivitas laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran keuangan sekolah di madrasah secara baik dapat dilakukan dengan meningkatkan manajemen RKAS, melaksanakan implementasi kebijakan RKAS secara optimal.

Kata kunci: kebijakan, manajemen RKAS, efektivitas penggunaan anggaran

1. Pendahuluan

Sekolah merupakan organisasi penyedia layanan pendidikan kepada masyarakat, yang senantiasa dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan dalam mencapai tujuan atau cita-citanya. Dalam proses pendidikan terdapat sumber-sumber yang dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan diantaranya adalah pembiayaan. Pembiayaan sangat berpotensi dan menentukan serta bagian dari pengelolaan keuangan. Sumber dana merupakan aspek yang sangat berperan dan tidak bisa dipisahkan karena dalam pencapaian mutu pendidikan memerlukan biaya yang sangat besar seperti dalam pemenuhan sarana prasarana yang menunjang proses belajar mengajar.

Masalah keuangan merupakan masalah yang cukup mendasar di sekolah karena berpengaruh secara langsung terhadap kualitas sekolah. Banyak sekolah yang tidak dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara optimal dikarenakan masalah keuangan seperti untuk menggaji guru maupun untuk mengadakan sarana dan prasarana pembelajaran. Oleh sebab itu, diperlukan

manajemen Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) untuk menunjang penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka mengefektifkan kegiatan belajar-mengajar, dan meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Hal demikian sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditetapkan dalam Sistem Pendidikan Nasional.

Salah satu penganggaran yang dilakukan di sekolah yaitu dengan penyusunan anggaran RKAS. RKAS merupakan rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan secara rinci untuk satu tahun anggaran. RKAS merupakan dokumen resmi sekolah yang disetujui oleh kepala sekolah dan yayasan, dan disahkan oleh Dinas Pendidikan atau Kementerian Agama bagi sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Pembiayaan yang dicantumkan dalam RKAS mencakup pengeluaran yang akan diterima dan dikelola oleh sekolah. Efektivitas Penyusunan anggaran RKAS dilaksanakan agar mengetahui secara rinci kewajiban yang harus dilaksanakan oleh sekolah, sehingga bisa terukur sekolah yang bermutu.

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah disusun awal tahun pelajaran, dalam penyusunan RKAS berdasarkan hasil kesepakatan antara kepala sekolah, dewan guru dan komite sekolah. Perencanaan pendidikan harus berpusat pada peserta didik serta menyesuaikan diri dengan kebutuhan yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan serta dalam pembuatan keputusan melibatkan sumber daya sekolah sehingga tercapai tujuan bersama (Sagala, 2013) (Sagala, 2013).

Dalam pengelolaan keuangan tidak hanya transparansi melainkan harus ada dukungan dari berbagai pihak, salah satunya adalah masyarakat yaitu komite sekolah dan wali murid. Selain dari transparansi dan akuntabilitas juga sangat penting dilakukan pengelolaan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS).

Berdasarkan latar belakang yang melatarbelakangi berbagai permasalahan di atas, oleh sebab itu peneliti menduga adanya hubungan sebab akibat (*causal effectual*) diantara fakta-fakta pada fenomena di atas yang memerlukan pengkajian lebih lanjut maka penulis tertarik untuk melakukan pengkajian dan penelitian lebih dalam dengan judul: **“Pengaruh Implementasi Kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah terhadap Manajemen Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) dalam Mewujudkan Efektivitas Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Keuangan Madrasah”** dengan lokasi penelitian dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah Swasta se Kelompok Kerja Madrasah (KKM) MIN 02 Garut.

2 Metodologi

Metoda yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Adapun yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah metode yang menggambarkan atau memaparkan fenomena masalah yang akan diteliti pada saat ini atau keadaan sekarang dengan tujuan mencari jawaban tentang pemecahan masalah dan hasilnya dilaksanakan setelah kegiatan eksploratif (Iskandar, 2016; Iskandar, 2016).

Adapun Teknik penelitian ini menggunakan teknik survey, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok untuk mengkaji gejala atau fenomena yang diamati (Ramdhani, 2013; Ramdhani & Ramdhani, 2016). Dengan demikian metode pendekatan dan teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap pemecahan masalah melalui pengumpulan informasi data lapangan yang menggambarkan faktor-faktor yang berhubungan antara fenomena yang diteliti, yaitu mengenai variabel-variabel implementasi

kebijakan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS), Manajemen rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS), dalam hubungannya dengan efektivitas laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran keuangan sekolah.. Analisis fakta-fakta hasil penelitian diklarifikasi dengan literatur yang relevan, sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Ramdhani & Ramdhani (2014), dan Ramdhani, et. al. (2014).

Untuk melihat kondisi objektif ada objek penelitian. Peneliti menetapkan operasionalisasi variabel penelitian, yang disusun untuk memudahkan langkah-langkah dalam menjaring dan mengumpulkan data yang diperoleh dari responden sesuai dengan teori-teori, konsep-konsep, proposisi-proposisi, dan asumsi-asumsi dari variabel-variabel penelitian yang ditetapkan. Adapun operasionalisasi variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.Operasionalisasi Variabel Penelitian

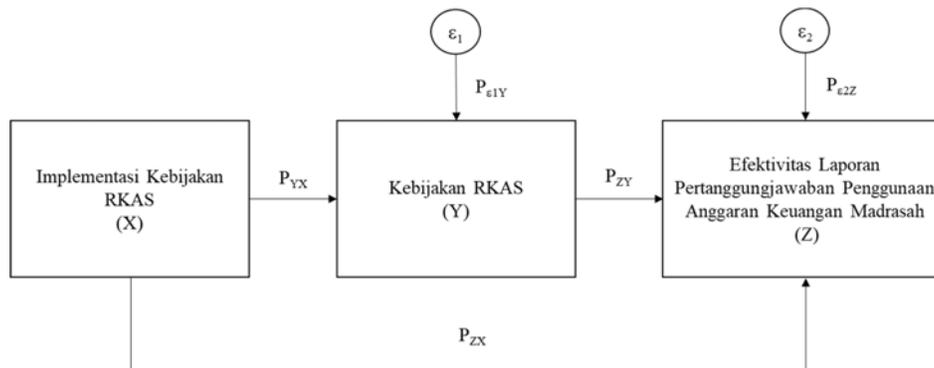
No	Variabel	Dimensi	Indikator
1	Implementasi Kebijakan (X) (Tilaar & Nugroho, 2012)	1. Communication	a. Sosialisasi tujuan dan manfaat kebijakan RKAS
			b. Koordinasi antar pelaksana
		2. Resources (sumberdaya)	a. Jumlah dan kompetensi guru yang terlibat
			b. Dukungan anggaran dan fasilitas
		3. Disposition or attitudes (sikap pelaksana)	a. Sikap pelaksana kebijakan
			b. Pemahaman kebijakan
		4. Bureaucratic structures (struktur birokrasi)	a. Standar operasional prosedur
			b. Implementator yang sesuai dengan kemampuannya serta menerapkan kebijakan secara efektif
2	Manajemen RKAS (Hidayat, 2012)	1. Perencanaan keuangan	a. Penyusunan rencana penerimaan anggaran
			b. Pengembangan rencana kegiatan
			c. Mengevaluasi efektifitas proses perencanaan
		2. Penggunaan Anggaran	a. Pengalokasian anggaran
			b. Pencatatan penyaluran anggaran
			c. Penyusunan program/ kegiatan
		3. Pelaporan Keuangan	a. Laporan
			b. Mengevaluasi pengelolaan keuangan
			c. Penyusunan program/ kegiatan
3	Efektifitas pertanggungjawaban penggunaan anggaran keuangan sekolah (Iskandar, 2016)	1. Adaptability	a. Hasil dari program/ kegiatan
			b. Inovasi dan Kreativitas
		2. Productivity	a. Prestasi peserta didik
			b. Mutu Sekolah
			c. Pertanggungjawaban
		3. Satisfaction	a. Reward
			b. Sistem Sosial dan perilaku pendidik
		4. Flexibility	a. Prioritas program dan kegiatan
b. Penggunaan Fasilitas			

Responden penelitian adalah seluruh guru di Madrasah Ibtidaiyah Swasta se Kelompok Kerja Madrasah (KKM) MIN 02 Garut berjumlah 73 orang. Pembahasan dilakukan atas implementasi kebijakan RKAS terhadap manajemen RKAS untuk mewujudkan efektivitas laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran keuangan sekolah.

3 Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini menguji fakta empiris tentang pengaruh implementasi kebijakan terhadap manajemen RKAS dalam mewujudkan efektivitas laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran keuangan sekolah di madrasah. Selanjutnya untuk mempermudah analisis, dilakukan pemodelan terhadap fokus penelitian dalam bentuk paradigma penelitian. Model adalah penyederhanaan dari dunia nyata yang dapat memperlihatkan relasi antar variabel (Amin & Ramdhani, 2006). Secara skematis hubungan *sebab-akibat* antara variabel dalam paradigma penelitian ini dapat digambarkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Paradigma penelitian

Hasil penelitian menyajikan hasil perhitungan statistika, yang dapat diwakili dalam bentuk tabel sebagaimana tersaji pada tabel Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Perhitungan

Hipotesis Utama	Koefisien jalur	F_{hitung}	F_{tabel}	Determinan	Makna hubungan
Pengaruh implementasi kebijakan RKAS terhadap manajemen RKAS dalam mewujudkan efektivitas laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran keuangan sekolah	0,3249	2,8747	1,9949	10,56%	Signifikan
Sub Hipotesis	Koefisien jalur	t_{hitung}	t_{tabel}	Determinan	Makna hubungan
Pengaruh implementasi kebijakan RKAS terhadap manajemen RKAS	0,2508	2,1828	1,9949	6,29%	Signifikan

Pengaruh implementasi kebijakan RKAS terhadap efektivitas laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran keuangan sekolah	0,3229	2,7452	1,9949	10,58%	Signifikan
Pengaruh manajemen RKAS terhadap efektivitas laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran keuangan sekolah	0,0079	0,0695	1,9949	0,07%	Tidak Signifikan

3.2 Pembahasan

Pendidikan adalah upaya sadar dan terencana peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Ainissyifa, 2014; Ramdhani, 2014; Ramdhani, et al., 2015). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa *“sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.”*

Sekolah/ madrasah merupakan organisasi publik yang dituntut untuk memberikan laporan pertanggungjawabannya kepada semua *stakeholders* baik warga sekolah maupun komite sekolah. Akuntabilitas pendidikan secara umum dibagi menjadi dua yaitu akuntabilitas pengelolaan dana dan akuntabilitas manajemen pendidikan. Akuntabilitas pengelolaan dana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2008 pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa *“pendanaan pendidikan adalah tanggung jawab bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat”*. Sedangkan pasal 59 ayat 1 disebutkan bahwa *“pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.”*

Berdasarkan uraian diatas dapat diperoleh gambaran bahwa akuntabilitas pengelolaan dana sekolah mendorong setiap kepala sekolah/ madrasah untuk melakukan pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan dan bisa diakses informasinya baik melalui media cetak maupun media elektronik.

Permendiknas No 19 Tahun 2007 pada Lampiran bagian a. Butir 1: Perencanaan program meliputi Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah/Madrasah, serta Renaca Kerja Sekolah; butir 4 d: Sekolah/ Madrasah membuat (1) rencana kerja jangka menengah yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu empat tahun, berkaitan dengan mutu lulusan yang ingin dicapai dan perbaikan komponen yang mendukung peningkatan mutu lulusan: (2) rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/ Madrasah (RKAS/M) dilaksanakan berdasarkan rencana jangka menengah.

Permendiknas No 19 Tahun 2007 pada Lampiran bagian B butir 8b menyatakan, bahwa pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional sekolah/ madrasah mengatur: (a) sumber pemasukan, pengeluaran dan jumlah dana yang dikelola; (b) penyusunan dan pencairan anggaran, serta penggalangan dana diuar dana investasi dan operasional; (c) kewenangan dan tanggung jawab

kepala sekolah/madrasah dalam membelanjakan anggaran pendidikan sesuai dengan peruntukannya; (d) pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran serta penggunaan anggaran, untuk dilaporkan kepada komite sekolah/madrasah, serta institusi di atasnya.

Implementasi MBS, manajemen komponen keuangan harus dilaksanakan dengan baik dan teliti mulai dari tahap penyusunan anggaran, penggunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Mulyono, 2010). Semua dana sekolah benar-benar dimanfaatkan secara efektif dan berjalan lancar apabila didukung oleh beberapa sumber yaitu sumber daya manusia yang kompeten dan mempunyai wawasan yang luas serta tepat waktu sesuai dengan dinamika sosial masyarakat, tersedianya informasi yang akurat, menggunakan manajemen yang tepat dalam perencanaan dan tersedianya dana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan”.

Adapun penganggaran adalah kegiatan atau proses penyusunan anggaran yang merupakan bagian dalam manajemen keuangan sekolah. Penyusunan anggaran merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu (Fattah, 2010; Fattah, 2012; Fattah, 2012).

Penggunaan anggaran di sekolah harus sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan namun pada kenyataannya operasional sekolah tidak sesuai dengan apa yang dijabarkan didalam RKAS. Permasalahan tersebut menjadi perhatian yang sangat penting bagi semua kepala madrasah untuk melaksanakan semua kegiatan yang sesuai dengan perencanaan kegiatan yang dibuat pada awal tahun pelajaran.

Adapun permasalahan yang terjadi di Madrasah Ibtidaiyah Swasta se KKM MIN 02 Garut adalah sebagai berikut:

- a. Warga madrasah bersikap pasif atas keputusan kebijakan yang akan dilaksanakan mengenai implementasi kebijakan RKAS atau memberi usulan kepada kepala madrasah mengenai anggaran keuangan sekolah.
- b. Dalam penyusunan anggaran sekolah dan pengelolaan dana operasional, sekolah tidak melibatkan guru dan komite sekolah sehingga penggunaannya tidak efektif. Serta kurang memahami anggaran yang disusun sehingga tidak memiliki alasan kuat untuk melakukan revisi anggaran sekolah.
- c. Rendahnya pengawasan dari warga madrasah mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam hal keuangan.
- d. Rendahnya tingkat pelaporan, tingkat transparansi dan akuntabilitas serta partisipasi masyarakat yang kurang karena tidak memiliki akses untuk mendapatkan informasi, sehingga mereka tidak bisa melakukan pengawasan dan implementasinya fungsi pengawasan sangat kurang.
- e. Terlambatnya pencairan dana BOS sehingga berpengaruh terhadap pelaporan yang sesuai dengan RKAS.
- f. Dalam penyampaian laporan terindikasi ada sekitar 15% tidak melaporkan RKAS kepada Seksi Pendidikan Madrasah Kab. Garut, sehingga mengakibatkan timbul tidak efektifnya pengelolaan penggunaan Anggaran

Berdasarkan fenomena tersebut terdapat 3 faktor yang menjadi kendala dalam proses penyusunan anggaran terhadap pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana keuangan sekolah. *Pertama*, disebabkan oleh bendahara atau kepala madrasah yang menyusun anggaran tersebut tidak memiliki pengetahuan yang cukup terhadap kegiatan atau prasarana yang dianggarkan. *Kedua*,

kurangnya komunikasi antara *stakeholder* yang ada, sehingga operasional sekolah tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan program yang dibutuhkan. *Ketiga*, anggaran belum mampu menghasilkan output yang optimal. Masalah ini terjadi karena ketidakjelasan serta keterkaitan antara item-item yang dibuatkan dalam RKAS dengan peningkatan proses kegiatan siswa dan guru. Seperti halnya permasalahan yang terjadi pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta se KKM MIN 02 Garut. Kurang optimalnya implementasi kebijakan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) serta lemahnya manajemen kebijakan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) sehingga berdampak terhadap Efektivitas laporan pertanggungjawaban anggaran keuangan sekolah se Kelompok Kerja Madrasah (KKM) MIN 02 Garut.

Pertanggungjawaban anggaran keuangan sekolah merupakan salah satu pilar pembangunan pendidikan, disamping pemerataan, perluasan akses dan peningkatan efektivitas-efisiensi tata kelola pendidikan. Pertanggungjawaban penggunaan anggaran keuangan sekolah harus bersifat transparan dan akuntabel. Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta memadai dan mudah dimengerti (Asmani, 2012).

3.2.1 Pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Manajemen RKAS dalam Mewujudkan Efektivitas Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Keuangan Madrasah

Rumusan hipotesis utama yang diajukan dalam penelitian ini adalah “*Terdapat pengaruh implementasi kebijakan RKAS terhadap manajemen RKAS dalam mewujudkan efektivitas laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran keuangan sekolah*”. Untuk menjawab hipotesis yang diajukan tersebut, maka dilakukan pengujian dengan menggunakan pengujian analisis jalur. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,3249.

Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh variabel pengaruh implementasi kebijakan RKAS terhadap manajemen RKAS dalam mewujudkan efektivitas laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran keuangan sekolah di madrasah, maka dilakukan pengujian yaitu dengan melihat perbandingan antara F_{hitung} dan F_{tabel} . Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 2,8747 lebih besar dari nilai F_{tabel} sebesar 1,9949. Dari nilai tersebut dapat ditarik kesimpulan statistik bahwa H_0 ditolak, artinya *terdapat Pengaruh implementasi kebijakan RKAS terhadap manajemen RKAS dalam mewujudkan efektivitas laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran keuangan sekolah di madrasah*.

Signifikansi nilai hasil pengujian di atas, didukung pula oleh nilai koefisien determinasi R^2 sebesar 0,1056 yang juga menunjukkan besarnya pengaruh implementasi kebijakan RKAS terhadap manajemen RKAS dalam mewujudkan efektivitas laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran keuangan sekolah di madrasah sebesar 10,56 %, hal ini disebabkan karena ada beberapa dimensi dalam variabel implementasi kebijakan RKAS belum dilaksanakan secara optimal.

Pada variabel implementasi kebijakan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana berdasarkan hasil observasi dan hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan penulis, didapatkan persentase terendah pada dimensi komunikasi, yaitu pada item “*Kepala sekolah dan komite sekolah terhadap semua masukan-masukan dari semua pihak untuk melaksanakan kegiatan-*

kegiatan yang akan dilaksanakan". Selain itu juga, didapatkan persentase terendah pada dimensi *resources (sumber daya)*, yaitu kurangnya dana talang yang dimiliki oleh sekolah untuk penggunaan anggaran. Pada dimensi *Disposition or Attitudes (Sikap Pelaksana)* ditemukan persentase terendah yaitu kurang optimalnya pelaksana kebijakan untuk mengetahui arah pelaksanaan kebijakan masih. Adapun untuk dimensi *Bureaucratic Structure (Struktur Birokrasi)* ditemukan persentase terendah yaitu pada item "*Pemberian wewenang sesuai dengan harapan yang telah ditetapkan*".

Pada variabel manajemen rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS), berdasarkan hasil observasi dan hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan penulis, didapatkan persentase terendah pada semua dimensi, terutama dimensi pelaporan keuangan. Hal ini disebabkan kurang optimal implementasi kebijakan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS). Sehingga pada akhirnya dengan kurang optimalnya pelaksanaan dimensi-dimensi tersebut, secara otomatis mengurangi besar pengaruh dari variabel implementasi kebijakan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) terhadap manajemen rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) dalam mewujudkan efektivitas laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran keuangan sekolah

Sedangkan sisanya sebesar 0,8944 atau sebesar 89,44 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini yang diduga mempengaruhi manajemen RKAS dan efektivitas laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran keuangan sekolah seperti pembinaan dari pihak sie pendidikan madrasah dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban BOS, kepemimpinan kepala madrasah, supervisi pengawas, dan tanggung jawab guru dalam melaksanakan pekerjaannya.

3.2.2 Pengujian Sub Hipotesis Pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Manajemen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai t_{hitung} 2,1828 dan nilai t_{tabel} yaitu sebesar 1,9949. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan H_0 ditolak, karena $t_{hitung}=2,1828 > t_{tabel}=1,9949$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel implementasi kebijakan RKAS berpengaruh signifikan terhadap variabel manajemen RKAS. Adapun besar pengaruh implementasi kebijakan RKAS terhadap variabel manajemen RKAS adalah sebesar 6,29 % sedangkan sisanya sebesar 93,71 % (epsilon) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model.

Pengaruh implementasi kebijakan RKAS terhadap manajemen RKAS sebesar 6,29% ini, disebabkan karena ada beberapa dimensi dalam variabel implementasi kebijakan RKAS yang belum optimal. Pada variabel implementasi kebijakan RKAS berpengaruh signifikan terhadap variabel manajemen RKAS, dimana berdasarkan hasil observasi dan hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan penulis, didapatkan persentase terendah pada dimensi *communication*, dimensi *resources (sumber daya)*, dimensi *Disposition or Attitudes (Sikap Pelaksana)*, dan dimensi *Bureaucratic Structure (Struktur Birokrasi)*.

Hasil pengujian di atas menguatkan dugaan bahwa penggunaan dimensi *Communication* dan dimensi *Disposition or Attitudes* dapat menentukan kualitas manajemen RKAS. Dari hasil pengamatan di lapangan, diketahui bahwa komunikasi dan sikap pelaksana pada implementasi kebijakan RKAS di Madrasah Ibtidaiyah KKM MIN 02 Garut berimbas pada baiknya manajemen RKAS dan menentukan kualitas manajemen RKAS. Dengan demikian, kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan RKAS dapat berpengaruh signifikan terhadap variabel manajemen RKAS. Sebagaimana hukum sebab akibat, semakin baik implementasi kebijakan

RKAS yang dilakukan oleh kepala sekolah dan guru MI Swasta se KKM MIN 02 Garut, maka akan semakin baik pula manajemen RKAS dalam pelaporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran keuangan. Dengan kata lain, hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhannya.

3.2.3 Pengaruh Implementasi Kebijakan RKAS terhadap Efektivitas Pertanggungjawaban Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Keuangan Sekolah

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai koefisien jalur (P_{ZX}) sebesar 0,3229. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai $t_{hitung}=2,7452$ dan nilai t_{tabel} yaitu sebesar 1,9949. Dari hasil pengujian tersebut, diketahui bahwa Implementasi Kebijakan RKAS berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pertanggungjawaban Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Keuangan Sekolah di MI Swasta se KKM MIN 02 Garut. Besar pengaruh secara langsung dari Implementasi Kebijakan RKAS berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Keuangan Sekolah di MI Swasta se KKM MIN 02 Garut sebesar 10,55%, sedangkan pengaruh tidak langsung Implementasi Kebijakan RKAS melalui manajemen RKAS adalah sebesar 0,02 %. Sehingga, jumlah pengaruh langsung dan tidak langsung variabel Implementasi Kebijakan RKAS berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pertanggungjawaban Laporan Pertanggungjawaban. Penggunaan Anggaran Keuangan Sekolah di MI Swasta se KKM MIN 02 Garut sebesar 10,58 %, sedangkan sisanya sebesar 89,42 % (epsilon) dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel Implementasi Kebijakan RKAS yang tidak dimasukkan ke dalam model.

Pengaruh Implementasi Kebijakan RKAS berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pertanggungjawaban Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Keuangan Sekolah di MI Swasta se KKM MIN 02 Garut sebesar 10,58 %. Hal ini disebabkan karena ada beberapa dimensi dalam variabel implementasi kebijakan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang belum terealisasi dan dilaksanakan belum optimal. Pada variabel implementasi kebijakan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana berdasarkan hasil observasi dan hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan penulis, didapatkan persentase terendah pada dimensi *communication*, yaitu pada item “*Kepala sekolah dan komite sekolah terhadap semua masukan-masukan dari semua pihak untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan*”. Selain itu juga, didapatkan persentase terendah pada dimensi *resources (sumber daya)*, yaitu kurangnya dana talang yang dimiliki oleh sekolah untuk penggunaan anggaran. Pada dimensi *Disposition or Attitudes* (Sikap Pelaksana) ditemukan persentase terendah yaitu kurang optimalnya pelaksana kebijakan untuk mengetahui arah pelaksanaan kebijakan masih. Adapun untuk dimensi *Bureaucratic Structure* (Struktur Birokrasi) ditemukan persentase terendah yaitu pada item “*Pemberian wewenang sesuai dengan harapan yang telah ditetapkan*”. Berdasarkan faktor tersebut, maka implementasi kebijakan RKAS terhadap efektivitas laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran keuangan sekolah di MI swasta se KKM MIN 02 Garut berdampak signifikan. Oleh karenanya, implementasi kebijakan RKAS dapat berpengaruh secara nyata terhadap efektivitas laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran keuangan sekolah di MI Swasta se KKM MIN 02 Garut.

3.2.2 Pengaruh Manajemen RKAS terhadap Efektivitas Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Keuangan Madrasah

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai koefisien jalur (P_{ZY}) sebesar 0,0079, dengan nilai $t_{hitung}=0,0695$ dan nilai t_{tabel} yaitu sebesar 1,9949. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan H_0 diterima, karena $t_{hitung}=0,0695 < t_{tabel}=1,9949$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Manajemen RKAS tidak berpengaruh terhadap Efektivitas Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Keuangan Sekolah. Adapun Manajemen RKAS tidak berpengaruh terhadap Efektivitas Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Keuangan Sekolah MI Swasta se KKM MIN 02 Garut, hal ini disebabkan karena ada beberapa dimensi dalam variabel manajemen RKAS yang belum terealisasi secara optimal. Pada variabel manajemen RKAS, berdasarkan hasil observasi dan hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan penulis, didapatkan dua persentase terendah pada dimensi pelaporan keuangan. Berdasarkan jawaban responden dan observasi di lapangan, terdapat masalah karena tidak tepatnya pencairan anggaran BOS setiap bulannya maka pelaporan keuangan tidak bisa dilaksanakan setiap satu bulan sekali kepada semua *stakeholder*. Serta madrasah tidak semuanya memiliki fasilitas internet untuk pelaporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran keuangan serta kurangnya sinyal internet bagi madrasah yang terdapat dipelosok serta mahalnya biaya yang dikeluarkan untuk mengakses internet pembuatan website yang bisa mengakses laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran keuangan.

Selanjutnya, temuan-temuan permasalahan penting lainnya yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

- a. Dalam implementasi kebijakan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) terdapat temuan yaitu pelaksana kebijakan belum sepenuhnya mengetahui arah pelaksanaan kebijakan.
- b. Dalam manajemen rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) terdapat temuan bahwa belum optimalnya pelaporan keuangan yang seharusnya dilaksanakan setiap 1 bulan sekali. Selain itu, setiap sekolah belum memiliki fasilitas internet untuk pelaporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran keuangan.
- c. Dalam efektivitas laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran keuangan sekolah terdapat temuan bahwa tidak semua sekolah mendapatkan nilai akreditasi yang baik serta kurangnya pengawasan dari komite madrasah atas kinerja sekolah mengenai tranparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

4 Kesimpulan

Hasil pengujian hipotesis utama dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) berpengaruh nyata dan positif serta signifikan terhadap manajemen rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) dalam mewujudkan efektivitas laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran keuangan sekolah.

Adapun pengujian pada sub-sub hipotesis menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS). Manajemen rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) tidak berpengaruh terhadap efektivitas laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran keuangan sekolah. Implementasi kebijakan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran keuangan sekolah.

Daftar Pustaka

- Ainissyifa, H., 2014. Pendidikan Karakter dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan UNIGA*, 8(1), pp. 1-26.
- Amin, A. S. & Ramdhani, M. A., 2006. Konfigurasi Model untuk Sistem Pendukung Keputusan. *Majalah Ilmiah Ekonomi Komputer*, 16(1), pp. 11-19.
- Asmani, J. M., 2012. *Tips menjadi kepala sekolah profesional*. Yogyakarta: DIVA Pers.
- Fattah, N., 2010. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Fattah, N., 2012. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Fattah, N., 2012. *Standar Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hidayat, A. S., 2012. *Penyusunan Program Kerja Sekolah*. Bandung: Mujahid Press.
- Iskandar, J., 2016. *Manajemen Publik*. Bandung: Puspaga.
- Iskandar, J., 2016. *Metoda Penelitian Sosial*. Bandung: Puspaga Bandung.
- Iskandar, J., 2016. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Puspaga.
- Mulyono, 2010. *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media Group.
- Ramdhani, A., Ramdhani, M. A. & Amin, A. S., 2014. Writing a Literature Review Research Paper: A step-by-step approach. *International Journal of Basic and Applied Science*, 3(1), pp. 47-56.
- Ramdhani, M. A., 2013. *Metodologi Penelitian untuk Riset Teknologi Informasi*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Ramdhani, M. A., 2014. Lingkungan Pendidikan dalam Implementasi Pendidikan Karakter. *Jurnal Pendidikan Universitas Garut*, 8(1), pp. 27-36.
- Ramdhani, M. A., Djamaluddin, D. & Ainissyifa, H., 2015. *Building Moderate Attitude through Character Education*. Songkla, Songkla University, pp. 791-798.
- Ramdhani, M. A. & Ramdhani, A., 2014. Verification of Research Logical Framework Based on Literature Review. *International Journal of Basic and Applied Science*, 3(2), pp. 11-19.
- Ramdhani, M. A. & Ramdhani, A., 2016. *Penelitian Pemasaran*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Sagala, S., 2013. *Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat*. Jakarta : Nimas Multina.
- Sagala, S., 2013. *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Jakarta : Alfa Beta.
- Tilaar, H. A. R. & Nugroho, R., 2012. *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.